

Judul : Fraksi sepakati solusi atasi perbedaan dalam RUU TPKS
Tanggal : Jumat, 07 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Fraksi Sepakati Solusi Atasi Perbedaan dalam RUU TPKS

SETIAP fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya menemukan titik tengah sebagai solusi atas perbedaan terhadap beberapa draf pasal di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Pembahasan RUU TPKS Willy Aditya di Jakarta, kemarin.

"Posisi RUU TPKS tinggal menunggu diparipurnakan sebagai usulan inisiatif DPR. Setelah itu kami menunggu surat presiden (surpres) untuk memulai pembahasan lebih lanjut," kata Willy.

Willy melanjutkan, jika tidak ada kendala, RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang pada Maret 2022. "Tergantung kapan Presiden

menerbitkan surpres berikut daftar inventaris masalah ke DPR. Paling lama 1,5 bulan."

Di penghujung tahun lalu, RUU TPKS urung disahkan di rapat paripurna DPR karena masih terganjal beberapa persoalan krusial.

Pertama, soal judul. Awalnya sudah disepakati RUU TPKS. Lalu Fraksi PKS mengusulkan agar judul diubah menjadi Tindak Pidana Kesusilaan. Adapun Fraksi PPP mengusulkan menjadi Tindak Pidana Seksual (TPS). Politikus PDIP mengusulkan penambahan kata 'pencegahan'. Akan tetapi, akhirnya panja menyepakati judul tetap RUU TPKS.

Kedua, sejumlah fraksi meminta urutan bab RUU TPKS

diubah. Salah satunya usulan bab pencegahan diletakkan di awal. Namun, panja menyepakati bab tersebut tetap di belakang karena berdasarkan logika objek harus diatur terlebih dahulu.

Ketiga, terkait pasal 6 dan 7 termasuk asas dan konsideran yang menuai kontroversi karena ada fraksi yang mendesak untuk memasukkan norma agama dan budaya.

Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani melalui keterangan tertulis mengemukakan partainya mendukung pembahasan RUU TPKS. "Dalam pembahasan dengan pemerintah tetap membuka ruang partisipasi publik. Draft RUU TPKS sudah banyak penyesuaian. Tidak lagi sekadar

kepastian hukum dan perlindungan korban, tetapi juga upaya pencegahan."

Menkum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan pemerintah segera mengirim surpres pembahasan RUU TPKS ke DPR. "Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Baleg. Pemerintah sudah sangat siap."

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual harus terpenuhi dalam UU TPKS.

"Komitmen mempercepat pembahasan RUU TPKS harus berpegang pada tujuan bahwa produk undang-undang yang dihasilkan mampu menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif," tandas perempuan yang akrab disapa Rerie itu di Jakarta, kemarin. (Uta/Atm/RO/X-3)